

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926),
- 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 7),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat
 - a Laporan Realisasi Anggaran,
 - b Neraca,
 - c Laporan Arus Kas,
 - d Catatan atas Laporan Keuangan,
 - e Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - f Laporan Operasional, dan
 - g Laporan Perubahan Ekuitas
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut

| | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|
| a | Pendapatan | Rp | 1 656 079 170 756,69 |
| b | Belanja dan Transfer | Rp | 1 662 255 332 563,37 |
| | Defisit | Rp | (6 176 161 806,68) |
| c | Pembiayaan | | |
| | Penerimaan | Rp | 181 403 446 519,17 |
| | Pengeluaran | Rp | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | Rp | 181 403 446 519,17 |
| d | Sisa Lebih Anggaran | Pembiayaan Rp | 175 227 284 712,49 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (27 628 809 612,69) dengan rincian sebagai berikut
 - a Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1 628 450 361 144,00
 - b Realisasi Rp 1 656 079 170 756,69
 - Selisih Lebih Rp (27 628 809 612,69)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (147 600 055 099,63) dengan rincian sebagai berikut
 - a Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1 809 855 387 663,00
 - b Realisasi Rp 1 662 255 332 563,37
 - Selisih Kurang Rp 147 600 055 099,63
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (175 228 864 712,32) dengan rincian sebagai berikut
 - a Surplus / defisit setelah perubahan Rp (181 405 026 519,00)
 - b Realisasi Rp (6 176 161 806,68)
 - Selisih Lebih Rp (175 228 864 712,32)

| | | | |
|-----|---|----|--------------------|
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1 579 999,83) dengan rincian sebagai berikut | | |
| a | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 181 405 026 519,00 |
| b | Realisasi | Rp | 181 403 446 519,17 |
| | Selisih Kurang | Rp | 1 579 999,83 |
| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (0,00) dengan rincian sebagai berikut | | |
| a | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b | Realisasi | Rp | 0,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1 579 999,83) dengan rincian sebagai berikut | | |
| a | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 181 405 026 519,00 |
| b | Realisasi | Rp | 181 403 446 519,17 |
| | Selisih Kurang | Rp | 1 579 999,83 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut

| | | | |
|---|------------------|----|----------------------|
| a | Jumlah Aset | Rp | 2 123 848 401 860,38 |
| b | Jumlah Kewajiban | Rp | 6 450 070 451,35 |
| c | Jumlah Ekuitas | Rp | 2 117 398 331 409,03 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut

| | | | |
|---|--|----|----------------------|
| a | Saldo awal kas daerah per 1 Januari tahun 2022 | Rp | 181 401 426 519,17 |
| b | Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 230 231 154 208,25 |
| c | Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (236 407 316 014,93) |
| d | Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 2 020 000,00 |
| e | Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0 00 |
| f | Saldo akhir Kas per 31 Desember Tahun 2022 | Rp | 175 227 284 712,49 |

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2022 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut

| | | | |
|---|--|----|----------------------|
| a | Saldo anggaran lebih awal | Rp | 181 401 426 519,17 |
| b | Penggunaan saldo anggaran lebih | Rp | (181 401 426 519,17) |
| c | Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan | Rp | 175 227 284 712,49 |
| d | Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e | Lain-lain | Rp | 0 00 |
| f | Saldo anggaran lebih akhir | Rp | 175 227 284 712,49 |

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2022 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai berikut

| | | | |
|---|---|----|----------------------|
| a | Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, | Rp | 1 533 936 991 170,97 |
| b | Beban dari kegiatan operasional | Rp | 1 486 406 707 306,66 |
| c | Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada | Rp | (1 821 708 463,84) |
| d | Pos luar biasa | Rp | (5 658 667 829,06) |
| e | Surplus/defisit-LO | Rp | 40 049 907 571,41 |

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi mengenai kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah, laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos

| | | | |
|---|---|----|----------------------|
| a | Ekuitas awal | Rp | 2 207 162 083 953,35 |
| b | Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan | Rp | 40 049 907 571,41 |
| c | Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar | Rp | (129 813 660 115,73) |
| d | Ekuitas akhir | Rp | 2 117 398 331 409,03 |

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari

| | | |
|---|----------------|--|
| a | Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran, |
| | Lampiran I 1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, |
| | Lampiran I 2 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, |
| | Lampiran I 3 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, |
| | Lampiran I 4 | Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, |
| b | Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, |
| c | Lampiran III | Laporan Operasional, |
| d | Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas, |
| e | Lampiran V | Neraca, |
| f | Lampiran VI | Laporan Arus Kas, |
| g | Lampiran VII | Catatan atas Laporan Keuangan, |
| h | Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, |
| i | Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, |
| j | Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, |
| k | Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, |
| l | Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, |
| m | Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, |
| n | Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan, |
| o | Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, |
| p | Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah, |
| q | Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek, |
| r | Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang, |
| s | Lampiran XIX | Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya, |
| t | Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, |
| | Lampiran XX 1 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan |
| | Lampiran XX 2 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah |

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 8 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 8 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

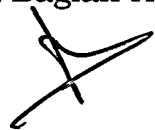
ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 01

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 93-1/2023**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S Sos, M Si
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006